

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

(Survey dilingkungan kantor dinas Pendapatan Daerah Tingkat I/ SAMSAT
Pekanbaru Selatan)



OLEH:

MERRI NUGRAHENI
10673004952

PROGRAM S1

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

(Survey dilingkungan kantor dinas Pendapatan Daerah Tingkat I/ SAMSAT
Pekanbaru Selatan)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mengikuti Ujian
Comprehensif Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan Akuntansi*



OLEH:

MERRI NUGRAHENI
10673004952

PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEKANBARU
(Survey di Lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I/
SAMSAT Pekanbaru selatan)

OLEH : MERRI NUGRAHENI
NIM : 10673004952

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Tingkat I/SAMSAT Pekanbaru Selatan yang berlangsung pada bulan Mei sampai Juli. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, dan pelayanan jasa mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor menggunakan instrument kuesioner.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisa Regresi Linear Berganda dengan menggunakan progam SPSS versi 16,0 yaitu dengan hasil $Y = 1,075 + 0,578 + 0,119 - 0,174 + 1,176 + e$.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak, yaitu kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, pelayanan jasa, Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama instrumen yang digunakan dalam penelitian ini handal dan valid melalui pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Pearson Correlation Out SPSS Viewer dan Cronbach Alpha. Kedua, secara parsial variabel kesadaran berpengaruh sebesar 57,8% dan pelayanan jasa mempunyai pengaruh sebesar 117,6%, terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel pendapatan dinyatakan tidak mempunyai pengaruh sebesar 11,9% dan jarak tempat tinggal sebesar 17,4% terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 66,2% artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, sedangkan 33,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : *Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, Kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, dan pelayanan jasa.*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak.....	8
B. Fungsi Pajak	10
C. Cara Pengenaan Pajak	12
D. Pajak Daerah	13
E. Pajak Kendaraan Bermotor	15
F. Hambatan Dalam Pembayaran Pajak	31
G. Pengertian Tunggakan Pajak	32
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan PKB	33
I. Tinjauan Pajak Dalam Islam	38
J. Model Penelitian	38
K. Hipotesis.....	39
L. Variabel Penelitian	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Populasi dan Sample	43
F. Analisis Data	44
G. Pengujian Hipotesis.....	46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat.....	50
B. Struktur Pemerintahan.....	51
C. Visi, Misi dan Tujuan Dipenda	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Data	58
B. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
1. Uji Validitas	59
2. Uji Reliabilitas	60
C. Analisa Data Penelitian	64
1. Analisa Uji Normalitas.....	64
2. Analisa Uji Asumsi Klasik.....	67
a) Uji Multikolinearitas	67
b) Uji Autokorelasi	68
c) Uji Heterokesatisita.....	69
D. Analisa Hasil Penelitian	70
E. Pengujian Hipotesis.....	72
1. Uji Parsial (T).....	72
2. Uji Simultan (F)	76
3. Uji Determinasi	77

BAB V HASIL KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	78
2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, maka perlu menggali sumber dana yang berasal dalam negeri kita sendiri.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri adalah kebijakan di bidang perpajakan. Roda pemerintahan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya, dari penerimaan dalam negeri yang terutama dari sektor pajak haruslah selalu ditingkatkan. Oleh karena itu pemerintah selaku pengelola pajak harus berusaha memberikan kemudahan pada masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas perpajakan yang memadai serta menerapkan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas-asas yang berlaku.

Sektor pajak sebagai bentuk perwujudan partisipasi aktif masyarakat, tentu diharapkan mampu mendukung penuh terlaksananya pembangunan nasional sehingga mau tidak mau mereka tidak dapat menghindar dari perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan

pembangunan Daerah yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, Apabila pajak tidak dibayar oleh masyarakat akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa jenis pajak propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sebagaimana yang kita ketahui untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pemerintah suatu negara ada kalanya harus melakukan berbagai pungutan kepada rakyatnya. Adapun pungutan yang dibebankan kepada rakyatnya ada bermacam-macam pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepadanya, namun yang berlaku umum hampir di semua negara adalah pajak dan retribusi.

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, oleh karena itu, hampir semua negara di dunia memberlakukan dan

mengenaikan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. (Liberty Pandiangan, 2002: 19)

Selanjutnya di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah Propinsi Riau memerlukan dana yang cukup besar, sebagaimana propinsi lain yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari pajak daerah. Dari jenis-jenis pajak propinsi yang ditetapkan salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sektor unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah. Namun harapan tersebut kerap tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

Jika dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.1
Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di
DIPENDA Tingkat I Pekanbaru Selatan

TAHUN ANGGARAN DESEMBER 2008 dan DESEMBER 2009

NO	TAHUN ANGGARAN DESEMBER 2008			
	TARGET DESEMBER 2008	Bulan ini	Bulan Lalu	s/d Bulan ini
1	330.000.000.000	26.847.234.246,00	331.937.453.952,00	358.784.688.198,00
1	TAHUN ANGGARAN DESEMBER 2009			
	TARGET DESEMBER 2009	Bulan ini	Bulan Lalu	s/d Bulan ini
	330.000.000.000	32.868.805.619,00	355.886.152.515,00	388.754.958.134,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau.

Dari keterangan tabel di atas bahwa target Pajak kendaraan bermotor pada tahun anggaran desember 2008 untuk kota pekanbaru selatan target sebesar 330.000.000.000,00 dan realisasinya pada bulan ini sebesar 26.847.234.246,00. Pada bulan lalu realisasinya sebesar 331.937.453.952,00. Sampai dengan bulan ini realisasinya sebesar 358.784.688.198,00. Sedangkan pada tahun anggaran desember 2009 sebesar 330.000.000.000,00 dan realisasinya pada bulan ini sebesar 32.868.805.619,00. Pada bulan lalu realisasinya sebesar 355.886.152.515,00. Sampai dengan bulan ini realisasinya 388.754.958.134,00.

Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara setiap wajib pajak mau membayar, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sendiri. Tanpa adanya pengertian dari

masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak.

Saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajiban untuk membayar pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak Kendaraan Bermotor bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU** (Survey dilingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I/SAMSAT Pekanbaru Selatan)’’.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran PKB?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah tunggakan PKB pada kantor DIPENDA Propinsi Riau Tingkat I/ SAMSAT Pekanbaru Selatan?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru untuk memperkecil jumlah tunggakan PKB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk lebih memahami tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah tunggakan PKB oleh Kantor DIPENDA Propinsi Riau Tingkat I/SAMSAT Pekanbaru Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang diambil oleh Kantor Dinas Pendapatan daerah Pekanbaru untuk memperkecil jumlah tunggakan PKB.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan.
2. Sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi ini maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang pengertian tunggakan pajak kendaraan bermotor, pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar-dasar teoritis sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini, konsep operasional, teknik pengukuran dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data, populasi dan sample, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum daerah yang diteliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dikemukakan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Yang dimaksud dengan Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. (Siahaan, 2005 : 10).

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan gunanya adalah untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelesaikan tugas pemerintah. (Siahaan, 2005 : 5).

Pajak menurut Rochmat Soemitro seperti yang dimuat dalam buku Hukum Pajak oleh wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton (2004 : 5):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah :

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang bisa langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau seperti distribusi (Wiryawan B. Ilyas 2004:5).

Kemudian beliau menjelaskan bahwa kata dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi. Akan tetapi apa yang dikemukakan di atas dikoreksi. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Rachmad Sownmitro, 1998:5)

Berdasarkan pengertian pajak tersebut di atas, menurut Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:5) disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak :

1. Iuran rakyat kepada negara
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung
5. Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah

Dari definisi pajak di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak merupakan sesuatu yang :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun Daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, dalam Sri Pudyatmoko (2002 :2) mengatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

B. Fungsi Pajak

Negara mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Begitu pula dengan pajak memiliki fungsi yang penting diantaranya adalah :

a) Fungsi Budgeter atas Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dititik beratkan pada sektor publik yang mengandung makna bahwa : (Sumyar :2004 : 38-39):

- 1) Upaya Pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat
- 2) Dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

- 3) Sisa atau Surplus dari dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public investment atau public saving*)

b) Fungsi Deregulasi

Fungsi Pajak sebagai alat deregulasi, diarahkan pada pihak swasta dalam bagian yang berfungsi sebagai bagian pendukung dari investasi. Sehingga sangat berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menata dan memantapkan struktur ekonomi Indonesia.

c) Fungsi Redistribusi

Pajak berfungsi sebagai Redistribusi adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain demi terwujudnya keadilan sosial, wujud bentuk kembalinya dalam masyarakat melalui APBN, pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan prasarana yang mendukung pembangunan di Indonesia (Sumyar : 2004 : 38-39)

Fungsi Pajak seperti dikemukakan Wirawan Bs. Ilyas dan Richard Burton dalam buku Hukum Pajak, yaitu :

1. Fungsi budgeter

Fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi regulierend

Fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia, Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).

4. Fungsi distribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

C. Cara Pengenaan Pajak

Menurut Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku Hukum Pajak (2004), terdapat tiga cara pengenaan pajak, yaitu :

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Stelsel Fiksi*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
3. Stelsel Campuran yaitu pengenaan pajak yang merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

D. Pajak Daerah

a) Pengertian Daerah

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah:

Pajak Daerah adalah Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

b) Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *Self Assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983.

Penetapan *Self Assessment* juga dianut dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot P.Siahaan dalam buku Pajak Daerah & Retribusi Daerah (2005). pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Sistem ini merupakan perwujudan dari *Self Assessment System* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Ditetapkan oleh Kepala Daerah

Sistem ini merupakan perwujudan *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

3. Dipungut oleh pemungut pajak.

Sistem ini merupakan perwujudan dari *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang.

E. Pajak Kendaraan Bermotor

a) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Keputusan Gubernur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam PERDA Propinsi Riau No. 13 Tahun 2002 ketentuannya pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 ayat 7 sebagai berikut : “pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang dijelaskan pada pasal 5 PERDA No. 13 Tahun 2002 yang berbunyi : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor”.

Kemudian Kendaraan Bermotor seperti yang dijelaskan dalam PERDA Propinsi Riau No. 13 Tahun 2002 adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat besar yang bergerak.

b) Objek dari Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2002 pada Bab II Pasal 3 : Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum.

c) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Sedangkan yang menjadi subjek kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2002 pada Bab II Pasal 5 yaitu : Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sekaligus menjadi wajib pajak.

Kemudian yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya.
- b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

d) Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun dasar hukum pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008.
5. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 13 dan 14 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

e) Cara Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar Pengenaan PKB

Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

- a. Isi silinder, isi ruangan yang berbentuk bulat tolak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan satuan daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merek kendaraan bermotor.
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyak penumpang yang diizinkan serta.
- g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2. Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap propinsi yang menurut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi. Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 5, tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3. Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

4. Sanksi dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan setiap produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah menganut sanksi. Begitupun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Keterlambatan mendaftar dalam tahun yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 25 % dari pokok pajak.
2. Keterlambatan membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak.

Sanksi ini diberikan setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak saat mendaftar.

Keringanan atau pembebasan PKB bisa dilakukan kepada :

- a. Kendaraan bermotor milik Palang Merah Indonesia dibebaskan dari pajak terhutang sepanjang dananya dari APBD/APBN terkecuali untuk jenis Sedan dan Stasion Wagon.
- b. Mobil pemadam kebakaran diberikan keringanan sebesar 75 % dari pokok pajak.
- c. Mobil Ambulance atau mobil jenazah diberikan keringanan 50 % dari pokok pajak.
- d. Kendaraan yang dimiliki oleh lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan diberikan keringanan 25 % dari pokok pajak terkecuali untuk Sedan dan Stasion Wagon.

f) Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. 46 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan bermotor, Prosedur pendaftaran dan pendataan wajib pajak yaitu :

- a. Kegiatan pendaftaran dan pendanaan wajib pajak diawali dengan persiapan dokumen yang diperlukan berupa formulir SPPKB dan disampaikan kepada wajib pajak.
- b. Setelah SPPKB dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, serta mengembalikan kepada petugas Dinas pada kantor bersama SAMSAT atau SAMSAT pembantu dan atau Dinas

Pendapatan Daerah dan atau pos pelayanan Pendapatan Daerah setempat.

c. Penyampaian SPPKB selambat-lambatnya :

1. 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan untuk kendaraan bermotor baru, mutasi didaerah.
2. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan berakhir masa pajak.
3. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah.

d. Keterlambatan penyampaian SPPKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak .

e. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari formulir SPPKB dihimpun atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang.

g) Tata Cara perhitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan SPPKB, Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

- b. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak dan tagih dengan menerbitkan STPD.
- c. Tata cara penetapan SKPD untuk pajak kendaraan bermotor adalah besarnya pajak terutang dihitung sebagai perkalian antara tarif PKB dengan dasar pengenaan pajak dalam hal ini adalah hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot.

h) Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran pajak kendaran bermotor dan atau pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan dikas Daerah dan atau Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) yang ditunjuk Gubernur pada kantor Pendapata Daerah dan pos pendapatan daerah setempat.
- b. Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan.
- c. Terhadap kendaraan bermotor yang dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia (re-Export) harus memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank pemerintah sebesar jumlah pajak yang terhutang yang disampaikan kepada kepala Dinas.

- d. Setiap pembayaran pajak harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKPD dan penning pajak kendaraan bermotor, serta dicatat dalam buku penerimaan.
- e. Tanda bukti berupa penning diberikan kepada wajib pajak sepanjang tersedianya dana pengadaan penning pada APBD.
- f. Tata cara pemasangan penning ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan atau ditangguhkan, setelah mendapat persetujuan Gubernur atas dasar permohonan tertulis dari wajib pajak.
- h. Permohonan disampaikan melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - 1. Identitas diri dan identitas kendaraan yang bersangkutan
 - 2. Kelengkapan surat-surat atau bukti lainnya yang sah
- i. Berdasarkan permohonan di atas, Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas, mengambil keputusan dengan menerbitkan surat persetujuan dan atau penolakan.
- j. Bilamana permohonan mengangsur dan atau ditangguhkan diterima, angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % sebulan, dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar .

i) Tata cara Pembukaun dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. SPPKB, SKPD, SKPDKB, dan STPD dan SPTD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- b. Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.
- c. Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- d. Atas dasar buku jenis pajak dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis pajak.
- e. Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

j) Tata Cara Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dilakukan dengan menerbitkan STPD.
- b. Surat teguran dan atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- c. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- d. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- e. Apabila jumlah pajak kendaraan bermotor yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- f. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat peringatan.
- g. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas, atau Pejabat yang ditunjukkan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.
- h. Setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.
- i. Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
- j. Kepala Dinas dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.

- k. Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah PKB yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- l. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

k) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Prosedur Pengurangan, Keringanan dan pembebasan pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, dengan ketentuan wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan memberi alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. Identitas diri dan identitas kendaraan
 2. Kelengkapan surat-surat dan bukti yang sah
- b. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas menerbitkan surat pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, setelah diadakan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap objek pajak di lapangan, sepanjang diperlukan.
- c. Khusus kendaraan bermotor milik pemerintah dibebaskan dari pengenaan PKB dengan ketentuan :

1. Instansi yang menguasai dan atau pemakai mengajukan permohonan pembebasan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas
 2. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas menerbitkan fiskal pembebasan PKB.
- d. Keringanan dan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor dapat diberikan terhadap objek pajak sebagai berikut :
1. Kendaraan Bermotor milik PMI dibebaskan dari pajak terutang sepanjang dananya dari APBN, APBN kecuali jenis sedan dan sedan station.
 2. Mobil Pemadam kebakaran diberikan keringanan sebesar 75 % dari pajak terutang.
 3. Mobil Ambulance atau Mobil Jenazah diberikan keringanan sebesar 50 % dari pajak terutang.
 4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh lembaga atau yayasan dan bergerak di bidang sosial atau keagamaan kecuali jenis sedan dan sedan station diberikan keringanan sebesar 25 % dari pajak terutang.

l) Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Prosedur Pembetulan, Pembatalan , Pengurangan Ketepatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 1. Membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 2. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajakan yang tidak benar
 3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
- b. Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketepatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas, dan melampirkan identitas diri wajib pajak atau kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan.
- c. Kepala Dinas paling lambat 3 hari bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- d. Apabila setelah lewat waktu 3 bulan kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan,

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

m) Tata Cara Penyelesaian keberatan

Prosedur Penyelesaian Keberatan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas terhadap hal-hal sebagai berikut :
 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPTN)
- b. Permohonan Keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- c. Kepala Dinas dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah memberi keputusan .

- d. Apabila setelah lewat waktu 12 bulan, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberi keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- e. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusannya keberatan
- f. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % sebulan untuk paling lama 24 bulan.

n) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor

Prosedur Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- b. Apabila jangka waktu 12 bulan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan.

- c. Apabila wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- d. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 bulan sejak diterbitkan nya SKPDLB, dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- e. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

F. Hambatan dalam Pembayaran Pajak

Hambatan dalam pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo :2001).

G. Pengertian Tunggakan Pajak

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Sedangkan pengertian Tunggakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia (2005 :612) yang diterbitkan oleh Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan:

Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur dan ditagih.

H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan PKB

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara. Tetapi masih ada kendala dalam pemungutan pajak tersebut, yaitu masih banyak tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Prof. W.J. de Langen yang dikutip oleh Buchari (1993:41) dalam Taufik (2009) ini dipengaruhi :

1. Kesadaran

Menurut Ernie Trisnawati Sule & Kurniawan Saefullah dalam buku pengantar manajemen (2005:220) Perilaku ini merujuk kepada tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Individu yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung akan memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan dan oleh karenanya kerjanya terorganisir dikarenakan perhatiannya tidak bercabang kemana-mana sebaiknya, individu yang tingkat kesadrannya rendah maka perhatiannya terhadap pekerjaan relatif kurang dan oleh karenanya kurang terorganisir dan kurang fokus.

2. Pengertian Pendapatan

Ada beberapa pengertian tentang pendapatan, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Menurut Donald E. Kieso & Jerry J. Weygant yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dalam buku *Akuntansi Intermediate* (2000)

Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama suatu periode.

Menurut SAK No. 23 (IAI 2007:23) tentang definisi pendapatan

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produk barang, pemberian jasa dan aktivitas pencairan laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* dikutip oleh Theodorus

Tuanakotta (2003:153) dalam buku *Teori Akuntansi* pengertian pendapatan adalah pendapatan sebagai inflow af asset dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1999:233) dalam buku *Standart Akuntansi Keuangan* menyebutkan bahwa pendapatan adalah :

Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Selain itu menurut Commite On Accounting Concep and Standart dari AAA dikutip oleh Theodeorus Tuanakotta (2000:144) dalam buku teori Akuntansi memberikan definisi pendapatan adalah :

Pernyataan moneter mengenai barang dan jasa yang ditranfer perusahaan kepada langganan-langgananya dalam jangka waktu tertentu.

Paton dan Littelon mengemukakan bahwa pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan moneter. Hal ini juga dikemukakan Suwardjono (2000:167) dalam buku teori Akuntansi Perekayasaan Akuntansi Keuangan bahwa dari aspek fisik pendapatan dapat dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Aspek moneter memberikan pengertian bahwa pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas

3. Jarak Tempat Tinggal

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat, atau waktu yg diperlukan oleh tiap kendaraan atau perseorangan untuk berjalan di antara dua titik tertentu.

Tempat adalah sesuatu yg mengenai tempat atau daerah.

Tinggal adalah masih tetap di tempatnya (<http://www.artikata.com>)

Dalam Taufik (2009) jarak tempat tinggal adalah jarak tempuh tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran pajak, jika rumah

wajib pajak jauh dari tempat pembayaran pajak, maka wajib pajak akan malas untuk membayar pajak, walaupun alat transportasi sudah memadai namun tetap saja masih ada wajib pajak yang enggan untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini yang dapat menyebabkan tunggakan pajak terjadi.

4. Pelayanan Jasa

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:11)

Jasa adalah aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, misalnya jasa pengacara, bengkel, biro, dll (Tjiptono, 2002:6)

Jasa atau pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberi nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat) bersifat tidak terwujud (Alma, 2002:205)

Terdapat lima dimensi kualitas jasa menurut Parasuruman (Tjiptono, 2002:70)

1. Bukti langsung (*Tangibles*) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (*reliability*) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan
3. Daya tanggap (*Responsiveness*) yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap
4. Jaminan (*Assurance*) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko atau keragu-raguan
5. Empati (*Empathy*) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan

Ada beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan yang harus diperhatikan dalam upaya perbaiki atau meningkatkan mutu pelayanan (Gasperz, 2004:15)

- a. Akurasi pelayana
- b. Ketepatan waktu pelayanan
- c. Kesopanan dan keramahan
- d. Tanggung jawab
- e. Kelengkapan
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan
- g. Variasi model pelayanan
- h. Pelayanan pribadi
- i. Kenyamanan dalam memperoleh layanan

Pelayanan yang diberi hendaknya selalu disempurnakan baik mutu maupun kualitas dimasa yang akan datang

Ada beberapa bentuk pelayanan yang dapat diberikan dalam memasarkan suatu produk kedalam pasar antara lain (Assauri,2001:150)

1. Pelayanan dari segi fisik
2. Pelayanan dari segi personal
3. Pelayanan dari segi proses

Secara spesifik pelayanan dibagi kedalam 3 bentuk kategori (Moenir, 2000)

1. pelayanan dengan lisan
2. pelayanan dengan tulisan
3. pelayana dengan perbuatan

Sejalan dengan uraian diatas Drucker (1998:139) mengatakan bahwa pelanggan hanya akan mau menggunakan jasa perusahaan apabila perusahaan yang melayani pelanggan itu dapat memberikan kepuasan dan nilai tepat waktu yang telah ditentukan dan terdapat pula kemudahannya.

Supaya layanan dapat memuaskan pelanggan maka petugas yang melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu:

1. Tingkah laku yang sopan
2. Cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya
3. Deterima oleh orang yang bersangkutan
4. Waktu penyampaian yang tepat
5. Keramahtamahan (Moenir,2000:197)

I. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Pajak dalam Islam terutang dalam Al-Qur'an Surat Attaubah ayat 29 seperti berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

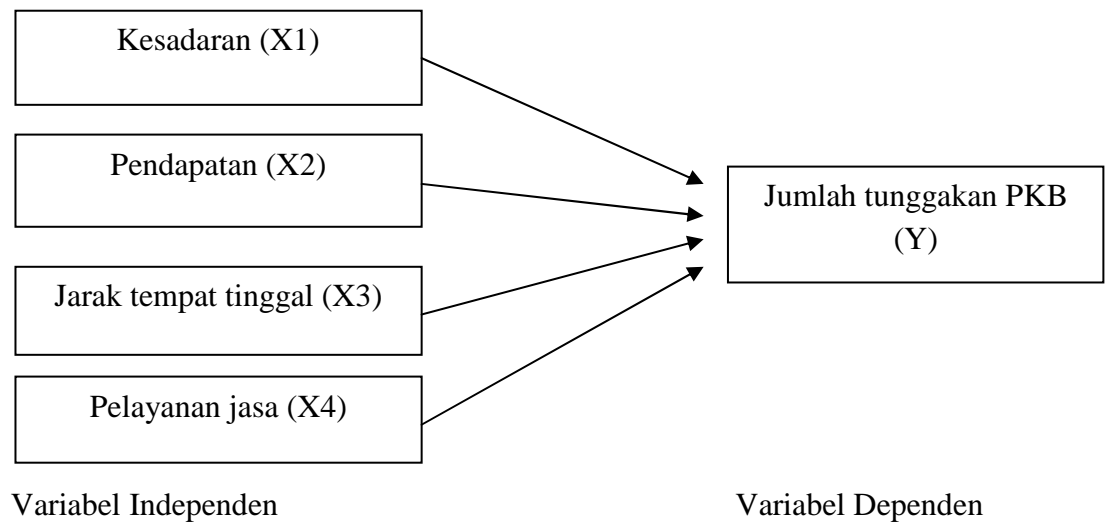
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kiamat Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (Q.S. At-Taubah : 29)

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

J. Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model penelitian berikut ini.

Gambar I.I Model Penelitian :



K. Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teoritis, maka hipotesis yang dapat penulis kemukakan adalah :

- H1 : Diduga kesadaran mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
- H2 : Diduga pendapatan mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
- H3 : Diduga jarak tempat tinggal mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
- H4 : Diduga pelayanan mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

L. Variabel penelitian

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan topik pembahasan di atas adapun adapun variabel-variabel yang diambil yaitu :

1. Variabel Independen Terdiri dari :
 - a. Kesadaran (X1)
 - b. Pendapatan (X2)
 - c. Jarak tempat tinggal (X3)
 - d. Pelayanan (X4)
2. Variabel Dependensi yaitu Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (Y)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, metode, tingkat eksplanasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi (Sugiyono, 2005)

Berdasarkan tingkat eksplantasi dan kedudukan variabel-variabelnya penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kuesioner yang diberikan berupa pertanyaan akan diberi nilai.

B. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru Selatan. Yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 6.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penulisan ini penulis menggunakan data penelitian sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan Quesioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih
2. Data sekunder yaitu data yang penulis dapat dari pihak ketiga tidak secara langsung, dalam bentuk laporan, serta melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan serta literatur lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pengamatan langsung atau Observation

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara atau interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Kuesioner (Angket)

Yairu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono : 2005 : 90).

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono : 2005 : 91).

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota pekanbaru.

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan Teori Slovin (1960) Dalam (Husein Umar, 2004)

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel/responden penelitian

N = Jumlah populasi secara keseluruhan

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (10 %)

Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 orang maka berdasarkan rumus Slovin (1960) dalam Umar (2004), maka pengambilan sampel dari jumlah kuesioner yang diedarkan minimal adalah sebagai berikut : Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang membayar PKB.

$$n = \frac{170,429}{1 + 170,429 (0,1)^2} = 99,41 \text{ (100 responden)}$$

F. Analisis Data

Metode pengujian kualitas data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksi. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Corelation*

b. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu anstrumen dapat dikatakan realiabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar (a) $\leq 0,6$, tidak realiabel, (b) $0,6-0,7$ *acceptable*, (c) $0,7-0,8$ baik (d) $> 0,8$ sangat baik

c. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2003:110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis

grafik dan uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametik *kolmogorov-smirnov* (*K-S*). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari α 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonearitas

Untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada berarti terdapat multikolinearitas. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Menurut Ghazali (2005:91) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation (VIF)*. Nilai *cutoff f* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

b. Uji Auto Korelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode $t-1$. Jika ada, berarti terdapat auto korelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari auto korelasi.

Menurut Ghazali (2005:98) untuk mengetahui ada tidaknya auto korelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson dimana : jika angka $D-W > d_l < (k-du)$ berarti tidak terdapat gejala auto korelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas (homokedastisitas).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji park untuk melakukan uji Heteroskedastisitas. Park mengemukakan metode bahwa variance (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$s^2_i = \alpha + \beta X_i$$

Persamaan ini dijadikan linear dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi :

$$\ln s^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Karena s^2_i umumnya tidak diketahui maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_i sebagai proksi, sehingga persamaan sebagai berikut :

$$\ln U^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Tingkat signifikan yang digunakan adalah α 0,05 yang lazim digunakan dalam penelitian pada ilmu-ilmu sosial.

G. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, digunakan analisis korelasi (*Correlation Analysis*) dan analisis regresi berganda (*Multi Regression analysis*) sebagai bentuk aplikasi regresi berganda. Permasalahan regresi berganda

digunakan untuk dapat mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independent. Dalam penelitian ini digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + e \dots\dots\dots H1$$

$$Y = a + b_2X_2 + e \dots\dots\dots H2$$

$$Y = a + b_3X_3 + e \dots\dots\dots H3$$

$$Y = a + b_4X_4 + e \dots\dots\dots H4$$

Dimana :

Y = Variabel Terikat (Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor)

X1,X2,X3,X4 = Variabel Bebas I,II,III,IV (Kesadaran, Pendapatan, Jarak tempat tinggal, pelayanan Jasa)

a = Konstanta

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi

e = Galat (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi berganda maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Hal ini dilakukan karena koefisien regresi maupun koefisien korelasi yang diperoleh merupakan hasil pengamatan terhadap sample. Untuk analisis regresi berganda pengujian hipotesisnya dilakukan secara menyeluruh (Uji F) dan secara parsial (Uji Statistik T). Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas pengujian-pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian.

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan pada hipotesis pertama yaitu untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel dependen. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dan F table.

Sebelum membandingkan nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) = $n - (K+1)$ agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Alpha (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,5 dengan hipotesis 2 sisi (*two tail*).

Apabila F hitung $< F$ table atau P value $> \alpha$, H_0 diterima dan H_a Ditolak, dan hasilnya tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independent secara bersama-sama tidak mempunyai hubungan dengan variabel dependen. Sebaliknya jika F hitung $> F$ table atau P value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikan Variabel Parsial (Uji Statistik T)

Setelah diketahui adanya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara bersama-sama, selanjutnya perlu diketahui apakah semua variabel independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan uji statistik T.

Pengujian dilakukan dengan dua arah (*two tail*) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independent secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 5 % dan Degree of freedom (df) = $n - 1$.

Apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan kata lain variabel independent secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel itu. Begitu juga sebaliknya jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Instansi

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts 29/I/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan daerah Propinsi Riau.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah secara bedaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah, maka ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1974 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat keputusan Nomor : PEM.061.341.24/27 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat Keputusan Menteri Dalam Nomor : KUPD 7/7/39-29 tanggal 31 Maret 1978 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Negeri : 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978 perihal Ralat Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 tanggal 3 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts.286/XI/1980 tanggal 27 Nopember 1980.

Dinas Pendapatan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau (Dipenda Prov. Riau) adalah merupakan sebuah instansi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar kewajibannya yang berupa pajak atas benda-benda yang dimilikinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dinas pendapatan daerah baik yang berada ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota memiliki peranan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kantor Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menjadi sumber pemasukan dana melalui beberapa item seperti pajak dan retribusi. Melalui kantor Dinas Pendapatan Daerah dana yang dikumpulkan melalui pajak dan retribusi dapat mempercepat arah pembangunan di segala bidang.

B. Struktur Pemerintahan

1. Struktur Organisasi Dipenda Propinsi Riau

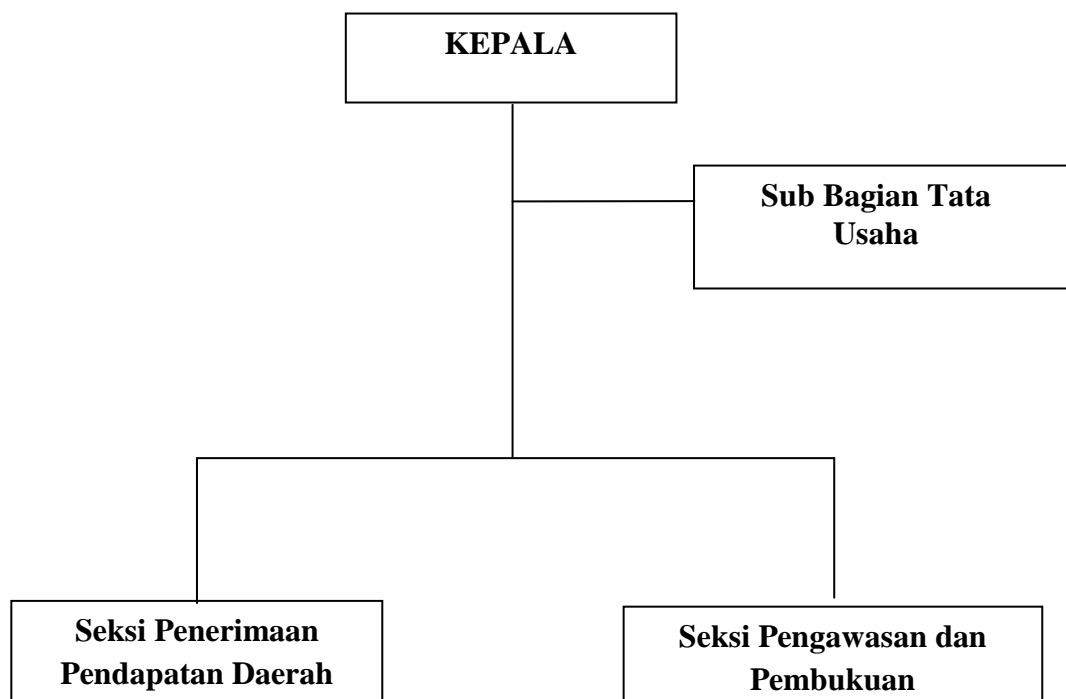
Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan usahanya harus digariskan dengan suatu tugas dan wewenang serta untuk mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur dapat dibuat sesuai dengan manajemen instansi dan untuk menggambarkan suatu organisasi diperlukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan format instansi.

Bentuk-bentuk struktur organisasi terdiri dari bentuk organisasi garis, bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Riau adalah bentuk organisasi garis. Adapun mengenai struktur organisasi dari Dinas Pendapatan Propinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar V. I

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN PROPINSI RIAU



Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau

2. Tugas dan Fungsi Kepala Dipenda Popinsi Riau

Dalam rangka untuk kelancaran tugas pada Dipenda Propinsi Riau, maka sangat diperlukan adanya pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan peraturan Gubernur No.3 Tahun 2005 pasal 9 :

1. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau dipimpin oleh kepala Kantor, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada propinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pendapatan Daerah Dinas Propinsi Riau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemungutan Retribusi, penagihan Pajak dan pendapatan asli daerah lainnya.
 - b. Menyelenggarakan pemungutan, penetapan, penagihan, pembukuan dan penyetoran pajak retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
 - c. Memberikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. Memberikan saran-saran pendapat dan pertimbangan mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah kepada Dinas Pendapatan Propinsi Riau baik diminta ataupun tidak.
2. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau.

- a. Kepala kantor Pendapatan daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Riau dengan memperhatikan usul dan saran Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Riau.
- b. Pembiayaan dalam Kantor Dinas Pendapatan Daerah Dinas pendapatan Propinsi Riau tercantum dalam peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2005 pasal 13 yaitu :
 - 1). Segala pembiayaan pembentukan kantor pendapatan Daerah Pendapatan Propinsi Riau dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Propinsi Riau.
 - 2). Kepada kepala Kantor Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau dapat diberikan biaya operasional sebagai pelaksanaan kegiatan penerimaan.

3. Tugas dan Fungsi Kasubag Tata Usaha Dipenda Propinsi Riau

Dalam menjalankan tugasnya kepala Pendapatan Propinsi Riau dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada kepala unit Pendapatan Propinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Tata Usaha yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas kegiatan dalam bidang administrasi umum
- b. Melakukan pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Melakukan pembukuan surat masuk dan surat keluar

- d. Membantu bendaharawan dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan
- e. Pembantu Umum

4. Tugas dan Fungsi Kasi Penerimaan Daerah Dipenda Propinsi Riau

Adapun tugas dan fungsi Kasi Penerimaan Daerah Dipenda Propinsi Riau yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pendaftaran dan membukukan SPPP-KB
- b. Membuat surat pembebasan pajak fiscal antar Daerah, pajak ABT/ AP
- c. Melakukan pengetikan STS/ Setoran Bank
- d. Melakukan Pendataan dan Pencetakan PKB dan BBN-KB
- e. Melakukan pembukuan Realisasi Penerimaan
- f. Membuat pembukuan penerimaan sejenis
- g. Melakukan pembukuan untuk wajib pajak
- h. Mengumpulkan arsip SKPD
- i. Pembantu Umum.

5. Tugas dan Fungsi kasi Pengawasan dan Pembukuan

- a. Melakukan pengawasan dari atasan kepada bawahan yang ada di dalam Sub Dinas.
- b. Melakukan pencegahan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan penilaian pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana.
- d. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.
- e. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

C. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Riau

VISI

Peningkatan Pendapatan daerah sebagai Sumber Dana dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan untuk menopang terlaksananya 5 (lima) pilar utama pemacu Pembangunan Riau.

MISI

1. Mengupayakan terpetanya Potensi Penerimaan baik dalam bentuk PAD maupun Dana Perimbangan.
2. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah.
3. Mengupayakan terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi dalam upaya peningkatan pendapatan Daerah.
4. Mengoptimalkan pelayanan Prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
5. Mendorong terwujudnya Akuntabilitas.

6. Menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan
7. Terwujudnya kesesuaian dan akurasi Data, transparans kinerja Aparat Dipenda menuju I dalam pelaksanaan kebijakan Penerimaan Daerah

TUJUAN

- a. Tersedianya data yang akurat dari Sumber-sumber penerimaan baik dari PAD maupun dari Dana Perimbangan dan penerimaan lainnya.
- b. Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam menggali Sumber-sumber potensi Penerimaan Daerah dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
- c. Menjamin adanya keselarasan baik dalam kebijakan 3 penyederhanaan sistem dan prosedur dalam upaya maupun pelaksanaan upaya peningkatan Pendapatan peningkatan Penerimaan daerah berdaya guna Daerah pada level propinsi dan lintas Kabupaten/ kota, dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan Aparat dalam upaya terciptanya mekanisme pelayanan Aparat bagi masyarakat, penyelesaian pekerjaan lebih cepat dan tepat secara tepat waktu.

SASARAN

- a. Mempermudah dalam menyusun perencanaan Penerimaan Daerah yang Akuntabel dan transparan.
- b. Meningkatkan Penerimaan Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Menerapkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- d. Memperjelas kewenangan penerimaan Daerah antar Kabupaten/Kota.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Data dilalukan melalui survey dengan mengirim kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor

Adapun hasil penyebaran kuesioner kepada para responden, berikut jumlah yang dikirimkan dan proporsi tingkat pengembalian secara lengkap di tunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel V.1
Gambaran Umun Responden

Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Umur responden		
- < 19 tahun	-	-
- 20 - 30 tahun	20	22,72
- 31- 40 tahun	28	31,81
- 41 - 50 tahun	20	22,72
- > 51 tahun	20	22,72
Total	88	100
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	45	51,13
- Perempuan	43	48,86
Total	88	100
Jabatan		
Pegawai Negeri Sipil	35	39,77
Petani	13	14,77
Wiraswasta	40	45,45
Total	88	100

Sumber : Data olahan

Tabel V.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kesadaran	88	13.00	25.00	21.1705
Pendapatan	88	13.00	19.00	15.6932
Jarak Tempat Tinggal	88	9.00	20.00	16.0455
Pelayanan Jasa	88	16.00	25.00	20.8295
Jumlah Tunggakan PKB	88	10.00	20.00	16.0568
Valid N (listwise)	88			

B. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui valid suatu variabel, dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik *reliability analysis* dengan nilai korelasi di atas 0,30.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar: (a) $<0,6$ tidak reliabel, (b) $0,6-0,7$ *acceptable*, (c) $0,7-0,8$ baik, dan (d) $>0,8$ sangat baik (Sekaran, 2000:171).

Tabel V.3
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesadaran (X1)

Item Pertanyaan	Nilai r Hasil dan Croanbach's Alpha	Kesimpulan	Item Pertanyaan yang Dipertahankan
1	0,587	Valid	Dipertahankan
2	0,887	Valid	Dipertahankan
3	0,846	Valid	Dipertahankan
4	0,891	Valid	Dipertahankan
5	0,874	Valid	Dipertahankan
Realibilitas Variabel X1	0,922	Reliabel	5 item

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel V.3 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas X1.1 sebesar 0.587, X1.2 sebesar 0.887, X1.3 sebesar 0,846, X1.4 sebesar 0,891, X1.5 sebesar 0,874. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0.587, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya terhadap 5 item pertanyaan, nilai *croanbach's alpha* adalah 0.922 dan semua item pertanyaan dapat dipertahankan. Variabel tersebut *reliabel* dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0.60.

Tabel V.4

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pendapatan(X2)

Item Pertanyaan	Nilai r Hasil dan <i>Croanbach's Alpha</i>	Kesimpulan	Item Pertanyaan yang Dipertahankan
1	0,639	Valid	Dipertahankan
2	0,379	Valid	Dipertahankan
3	0,440	Valid	Dipertahankan
4	0,620	Valid	Dipertahankan
Reliabilitas Variabel X2	0,99	Reliabel	4 item

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas X2.1 sebesar 0,639, X2.2 sebesar 0,379, X2.3 sebesar 0,440, X2.4 sebesar 0,620. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0,379, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya terhadap 4 item pertanyaan, nilai *croanbach's alpha* adalah 0,99 dan semua item pertanyaan dapat dipertahankan. Variabel tersebut tidak *reliabel* dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha di bawah 0,60.

Tabel V.5
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel jarak tempat tinggal (X3)

Item Pertanyaan	Nilai r Hasil dan <i>Croanbach's Alpha</i>	Kesimpulan	Item Pertanyaan yang Dipertahankan
1	0,689	Valid	Dipertahankan
2	0,877	Valid	Dipertahankan
3	0,768	Valid	Dipertahankan
4	0,875	Valid	Dipertahankan
Reliabilitas Variabel X3	0,817	Reliabel	4 item

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel V.5 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas X3.1 sebesar 0.689, X3.2 sebesar 0,877, X3.3 sebesar 0,768, X3.4 sebesar 0,875. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0,689, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya terhadap 4 item pertanyaan, nilai *croanbach's alpha* adalah 0.817 dan semua item pertanyaan dapat dipertahankan. Variabel tersebut *reliabel* dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

Tabel V.6

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelayanan Jasa (X4)

Item Pertanyaan	Nilai r Hasil dan <i>Croanbach's Alpha</i>	Kesimpulan	Item Pertanyaan yang Dipertahankan
1	0,432	Valid	Dipertahankan
2	10,603	Valid	Dipertahankan
3	0,622	Valid	Dipertahankan
4	0,593	Valid	Dipertahankan
5	0,419	Valid	Dipertahankan
Realibilitas Variabel X4	0,408	Reliabel	5 item

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas X4.1 sebesar 0.432, X4.2 sebesar 0.603, X4.3 sebesar 0,622, X4.4 sebesar 0,593, X3.5 sebesar 0,419. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0,419, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya terhadap 5 item pertanyaan, nilai *croanbach's alpha* adalah 0.408 dan semua 5 item pertanyaan dapat dipertahankan. Variabel tersebut *reliabel* dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

Tabel V.7
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Jumlah Tunggakan PKB (Y)

Item Pertanyaan	Nilai r Hasil dan <i>Croanbach's Alpha</i>	Kesimpulan	Item Pertanyaan yang Dipertahankan
1	0,340	Valid	Dipertahankan
2	0,627	Valid	Dipertahankan
3	0,794	Valid	Dipertahankan
4	0,753	Valid	Dipertahankan
Reliabilitas Variabel Y	0,491	Reliabel	4 item

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas Y.1 sebesar 0,340, Y.2 sebesar 0.627, Y.3 sebesar 0,794, Y.4 sebesar 0,753. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0,340, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya terhadap 4 item pertanyaan, nilai *croanbach's alpha* adalah 0,491 dan semua item pertanyaan dapat dipertahankan. Variabel tersebut *reliabel* dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

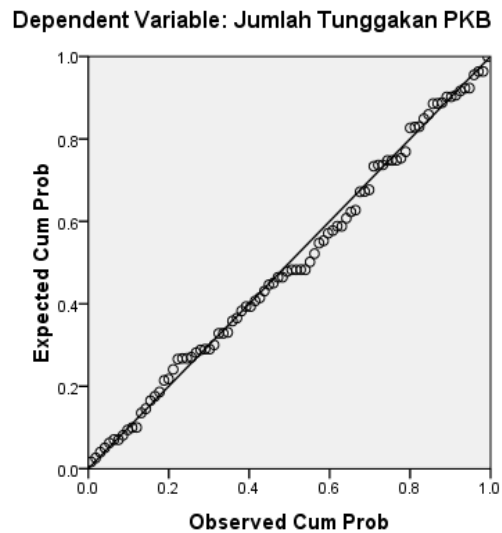
C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Uji Normalitas

Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan *grafik normal P-P Plot of Regression Standarized Residual*. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (Santoso, 2001: 214). Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar V.1 di bawah

Gambar V.1

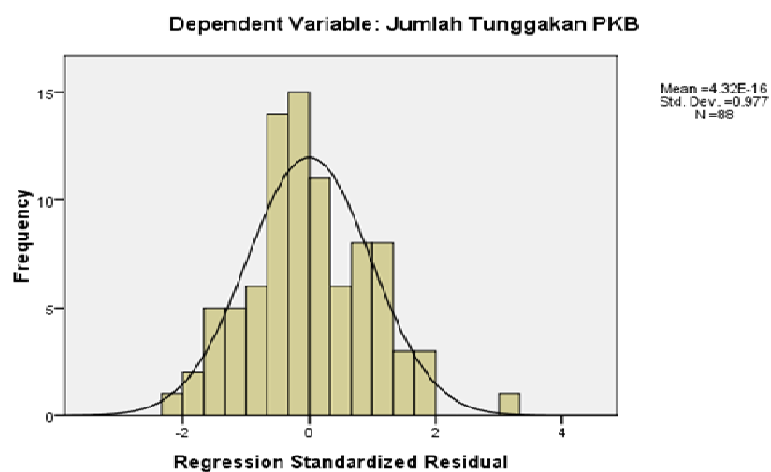
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Olahan SPSS

Gambar V.2

Histogram



Sumber : Data Olahan SPSS

Uji Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis jika terdapat Normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal.

Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, Kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal (Ghozali, 2005:30). Hasil uji Normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel V.8 di bawah:

Tabel V.8
Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai K-S-Z	Sig. (2-Tailed)	Kriteria	Kesimpulan
Kesadaran	2,261	0,000	0,05	Normal
Pendapatan	1,472	0,026	0,05	Normal
Jarak Tempat Tinggal	1,121	0,162	0,05	Normal
Pelayanan Jasa	1,685	0,007	0,05	Normal
Jumlah Tunggakan PKB	1,214	0,105	0,05	Normal

Lampiran One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Sumber : Data Olahan SPSS

Tabel V.8 menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel kesadaran, adalah sebesar 2,261 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai K-S-Z untuk variabel pendapatan, adalah sebesar 1,472 dengan signifikansi sebesar 0,026. Nilai K-S-Z untuk variabel jarak tempat tinggal, adalah sebesar 1,121 dengan signifikansi sebesar 0,162. Nilai K-S-Z untuk

pelayanan jasa, adalah 1,685 dengan signifikansi sebesar 0,007. Nilai K-S-Z untuk variabel jumlah tunggakan PKB

Apabila nilai signifikansi masing-masing variabel dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi K-S-Z tersebut di atas $\alpha = 0,05$, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kesadaran, variabel pendapatan, variabel jarak tempat tinggal, variabel pelayanan jasa, variabel jumlah tunggakan PKB secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

2. Analisis Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh multikolinearitas dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) melalui aplikasi SPSS di bawah 10. karena $VIF = 1/\text{tolerance}$, maka asumsi bebas multikolinearitas juga dapat ditentukan jika tolerance di atas 0,10.

Tabel V.9
Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran	0,516	6,410	Bebas
Pendapatan	0,971	1,030	Bebas
Jarak Tempat tinggal	0,151	6,636	Bebas
Pelayanan Jasa	0,786	1,273	Bebas

Tolerance & VIF Multikolinearitas

Sumber : Data Olahan SPSS

Pada tabel V.9 di atas menunjukkan variabel kesadaran mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,516 sedangkan nilai VIF 6,410, variabel pendapatan mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,971 sedangkan nilai VIF 1,030, variabel jarak tempat tinggal mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,151 sedangkan nilai VIF 6,636, variabel pelayanan jasa mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,786 sedangkan nilai VIF 1,273 dari semua variabel independen tidak ada nilai VIF di atas 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,10. Berarti tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dan layak digunakan.

b) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada Autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif

Tabel V.10
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin-Watson
Kesadaran	1,817
Pendapatan	1,817
Jarak tempat tinggal	1,817
Pelayanan jasa	1,817

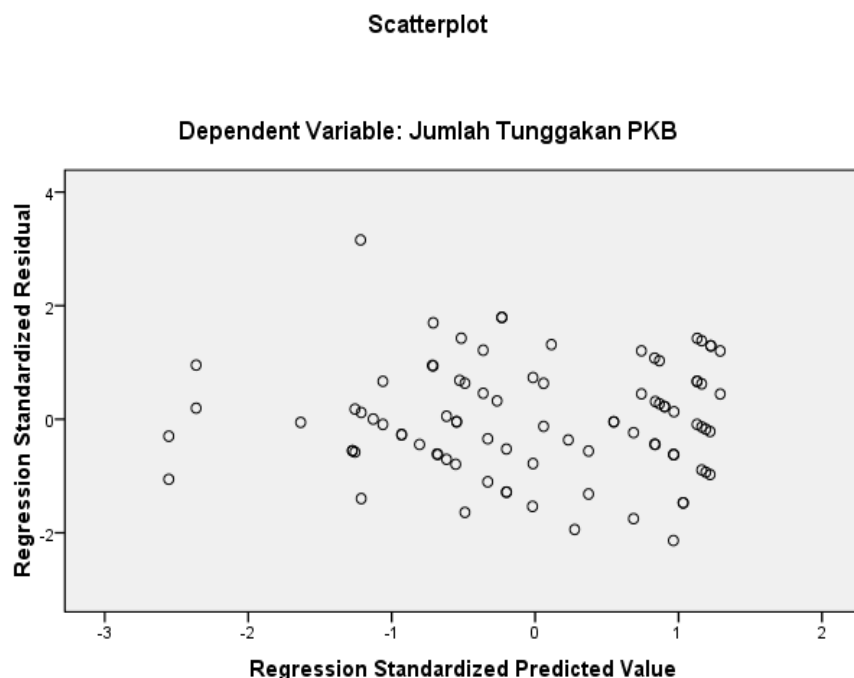
Durbin-Watson Autokorelasi

Sumber : Data Olahan SPSS

Pada tabel V.10 terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai Durbin Watson diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 1,817 yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas dari autokorelasi.

c) Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Santoso, 2001: 210). Seperti terlihat pada gambar V.3 :

Gambar V.3

Sumber : Data Olahan SPSS

Pada Gambar V.3 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

D. Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresi linear, dilakukan dengan menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan Jumlah Tunggakan Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen terhadap kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal dan pelayan jasa sebagai variabel independen. Hasil hipotesis seperti yang tercantum dalam tabel V.11 di bawah :

Tabel V.11
Hasil Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.075	1.839		.585	.560		
Kesadaran	.578	.099	.937	5.848	.000	.156	6.410
Pendapatan	.119	.081	.094	1.464	.147	.971	1.030
Jarak Tempat Tinggal	-.174	.120	-.236	-1.446	.152	.151	6.636
Pelayanan Jasa	.176	.077	.163	2.289	.025	.786	1.273

a. Dependent Variable: Jumlah Tunggakan PKB

Sumber : Data Olahan SPSS

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y \text{ (Jumlah Tunggakan PKB)} : 1,075 + 0,578X_1 + 0,119X_2 - 0,174X_3 + 1,176X_4 + e$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1,075 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 1,075.
2. Harga koefisien $b_1 = 0,578$, berarti bahwa apabila nilai kesadaran mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,578.
3. Harga koefisien $b_2 = 0,119$, berarti bahwa apabila nilai pendapatan mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,119.

4. Harga koefisien $b_3 = 0,174$ berarti bahwa apabila nilai jarak tempat tinggal mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,174.
5. Harga koefisien $b_4 = 1,176$ berarti bahwa apabila nilai pelayanan jasa mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,176

E. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan dua uji statistik yaitu uji t dan uji F setelah melewati beberapa pengujian, maka data dapat diolah lebih lanjut untuk dilakukan uji hipotesis, tahap-tahap yang akan dilakukan dalam uji ini adalah:

1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual atau parsial serta untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya bersifat konstan.

Tabel V.12
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Sumber :
Dat
a

Pengujian Hipotesis	B	t_{hitung}	Sig.	t_{tabel}	Keterangan	Keputusan
H1	0,578	5,848	0,000	1,671	Signifikan	Diterima
H2	0,119	1,464	0,147	1,671	-	Ditolak
H3	0,174	-1,446	0,152	1,671	-	Ditolak
H4	1,176	2,289	0,025	1,671	Signifikan	Diterima

Olahan SPSS

a) H_1 : Kesadaran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien kesadaran sebesar 0,578 yang berarti ada hubungan positif antara kesadaran dengan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

t_{hitung} sebesar 5,848

t_{tabel} sebesar 1,671

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dikota Pekanbaru Selatan.

b) H_2 : Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien pendapatan sebesar 0,119 yang berarti tidak ada hubungan positif antara budaya organisasi dengan kinerja Pemerintah Daerah. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

t_{hitung} sebesar 1,464

t_{tabel} sebesar 1,671

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_2 ditolak

Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor karena jumlah pendapatan wajib pajak dikota Pekanbaru dapat dikatakan sudah memadai.

c) H_3 : Jarak Tempat tinggal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal sebesar 0,174 yang berarti tidak ada hubungan positif antara jarak tempat tinggal dengan kinerja jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

t_{hitung} sebesar -1,446

t_{tabel} sebesar 1,671

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_3 ditolak

Hasil ini menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sudah banyak cara yang dilakukan oleh dinas perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

d) H4 : Pelayanan Jasa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien kesadaran sebesar 1,176 yang berarti ada hubungan positif antara kesadaran dengan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

t_{hitung} sebesar 2,289

t_{tabel} sebesar 1,671

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_4 diterima

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa secara signifikan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru Selatan. petugas penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor harus lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap setiap wajib pajak yang akan membayar pajak dan bagi wajib pajak yang memerlukan penjelasan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap dependen atau terikat. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F.

Tabel V.13

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	290.204	4	72.551	41.669	.000 ^a
Residual	144.512	83	1.741		
Total	434.716	87			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Jasa, Pendapatan, Kesadaran, Jarak Tempat Tinggal

b. Dependent Variable: Jumlah Tunggakan PKB

Hasil uji statistik ini akan berpengaruh jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel anova diperoleh F_{hitung} sebesar 41,669 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,53 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, pelayanan jasa secara bersamaan berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor .

3. Hasil Uji Determinasi

Tabel V.14
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.817 ^a	.668	.652	1.31951	1.817

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Jasa, Pendapatan, Kesadaran, Jarak Tempat Tinggal

b. Dependent Variable: Jumlah Tunggakan PKB

Nilai R (koefisien korelasi) ketiga variabel bebas tersebut (kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, pelayanan jasa) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pengaruh ini dapat diketahui dari hasil koefisien determinasi (R^2) yang memiliki nilai 0,668 yang artinya 66,8% dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, pelayanan jasa. Sedangkan sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini (Santoso, 2001:366).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dan pembahasan atas rumusan masalah dengan ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor :

1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan atau pembayaran dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan di kas Daerah dan atau bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) yang ditunjuk Gubernur pada kantor Pendapatan Daerah dan pos Pendapatan daerah setempat.
2. Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 bulan.
3. Permohonan harus disampaikan melalui kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Identitas diri dan identitas kendaraan yang bersangkutan.
 - b. Kelengkapan surat-surat atau bukti lainnya yang sah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor :

1. Pengaruh masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan uji t yang dilakukan adalah :
 - a. Kesadaran (X_1)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $5,848 > t$ tabel sebesar $1,671$ dengan koefisien $0,578$ maka H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

b. Pendapatan (X_2)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $1,464 < t$ tabel sebesar $1,671$ dengan koefisien $0,119$ maka H_2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena wajib pajak kurang mentaati dan menjalankan kewajibannya.

c. Jarak tempat tinggal (X_3)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $-1,446 > t$ tabel sebesar $1,671$ dengan koefisien $0,174$ maka H_3 ditolak Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena wajib pajak kurang mentaati dan menjalankan kewajibannya.

d. Pelayanan Jasa (X_4)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar $2,289 > t$ tabel sebesar $1,677$ dengan koefisien $1,176$ maka H_4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara signifikan

berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

2. Nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,668 (66,8%) artinya dugaan dari keempat variabel sebesar 66,8% variabel independent mempengaruhi variabel dependent, Sebesar 33,8% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Dari keempat variabel bebas tersebut, variabel kesadaran dan pelayanan jasa memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel pendapatan dan jarak tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru Selatan.

Upaya yang dilakukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru untuk memperkecil jumlah tunggakan PKB :

1. Kepada Pihak Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tentang arti penting pembayaran pajak, manfaat serta fungsi pajak secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
2. Dipenda perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajak terutang dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dengan ini penulis akan mencoba memberikan saran kepada pihak yang terkait yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat Wajib Pajak mempunyai rasa kesadaran yang tinggi dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan.
3. Dipenda perlu meningkatkan pengawasan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menambah jumlah petugas dilapangan sehingga kebocoran dalam pemungutan pajak dapat dihindari.
4. Dipenda perlu mensosialisasikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah agar dapat mewujudkan masyarakat yang taat Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Jasa*, AlfaBeta, Bandung, 2002

Assauri, Sofyan, *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi*, Rajawali, Jakarta, 2001

Boediono, *Pelayanan Prima perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Drucker, F. Peter, *Manajemen Pemasaran Dasar dan Strategi*, Rajawali, Jakarta, 1998

Ernie Trisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2005

Gasperaz, Wincent, *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Ghozali, Imam, 2005 *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi IV, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Handoko. T. Hani. 2000. *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku*. BPFE. Yogyakarta.

Http : // www.artikata.com

Ilyas, Wiryawan B. Dan Richard Burton. 2004. *Pajak Hukum*. Jakarta : Salemba Empat.

Kartasasmita, Hussein, 2001. *Ketentuan Umum dann Tata Cara Perpajakan*, penerbit Yayasan Bina Pajak Raya, Jakarta.

Mardiasmo, 2001. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

Moenir, H. AS, *Manajemen Pelayanan Umum di indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pandiangan, Liberty, 2002. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.

- Pudyatmoko, Sri, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta : Andi.
- P.Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ratminto, Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rimsky K Judisuseno, 2004. *Perpajakan*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah* Jakarta : PT. Grasindo.
- Sumyar, 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Taufik, 2009. *Skripsi (Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hilir)*, Pekanbaru.
- Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, Penerbit Andika, Yogyakarta, 2002
- Umar, Husein, 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, 2006. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Weygandt, Kieso. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.*
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*
- Keputusan Gubernur Riau Nomor 46 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan*
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*